



Peranan Aparatur Pemerintah Kecamatan Dalam Pemberdayaan dan Keamanan dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ampana Tete

Galip Lahada^{a,1*}, M.Yasser Fedayen^{b,2}

^{a, b} Jurusan Administrasi Publik, FISIP Universitas Sintuwu Maroso, Jl. P. Timor No. 1, Poso, Sulawesi Tengah, 94619

¹ email penulis pertama*; galiplahada@unsimar.ac.id : yafeday@unsimar.ac.id

*korespondensi penulis: yafeday@unsimar.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 02-8-22

Disetujui: 23-8-22

Kata Kunci:

Keamanan
Ketertiban Umum
Pemberdayaan Masyarakat
Peranan

Keywords:

Security
Public Order
Community Empowerment
Role

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan aparatur Pemerintah Kecamatan Ampana Tete dalam pemberdayaan masyarakat dan keamanan dan ketertiban umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan analisis data dilakukan mulai dari reduksi, penyajian data dan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan tugas dan kewajibannya untuk pemberdayaan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban umum sudah berjalan cukup baik. Pemerintah Kecamatan Ampana Tete telah melaksanakan pemberdayaan di bidang pemerintahan desa dan ekonomi. Untuk ketentraman dan ketertiban umum, Pemerintah Kecamatan Ampana Tete melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk melakukan pendekatan secara agama dan budaya sehingga tercipta keamanan dan ketertiban di masyarakat. Namun tentu saja kinerja aparatur Pemerintah Kecamatan ini juga masih belum sepenuhnya optimal dikarenakan disiplin pegawai itu sendiri dan dinamika Masyarakat Kecamatan Ampana Tete yang sangat kompleks.

Abstract: This study aims to determine the role of the Ampana Tete District Government apparatus in community empowerment and public order and security. The method used in this study is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation and data analysis is carried out starting from reduction, data presentation and verification and drawing conclusions. The results of the study indicate that in carrying out its duties and obligations for community empowerment and public order and security has been running quite well. The Ampana Tete District Government has carried out empowerment in the fields of village government and economy. For public order and security, the Ampana Tete District Government involves religious leaders and community leaders to take a religious and cultural approach so that security and order are created in the community. However, of course the performance of the District Government apparatus is still not fully optimal due to the discipline of the employees themselves and the dynamics of the Ampana Tete District Community which are very complex.



PENDAHULUAN

Peranan aparatur pemerintah dalam rangka melayani masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuannya sehingga menjadi aparat yang mampu terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan pelayanan yang prima.

Di era perkembangan otonomi daerah sekarang ini, yang banyak mendapat sorotan adalah kapasitas aparatur sebagai penyelenggara aparatur pemerintah contohnya, pembagian tugas di kantor kecamatan, selain itu pembangunan contohnya, perbaikan sarana dan prasarana di kantor camat, dan juga pelayanan masyarakat sebagai sasaran dari peranan aparatur Negara, sebagai contoh, pembuatan identitas penduduk. Olehnya sumber daya manusia yang berkualitas akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi organisasi berupa peningkatan efektifitas, efisiensi, moral dan stabilitas serta keluwesan dalam penyesuaian diri dengan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehubungan dengan itu peranan aparatur pemerintah sampai saat ini menjadi objek studi yang menarik, oleh karena pemerintah merupakan suatu kelompok yang memegang tugas penting dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan kehidupan masyarakat.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, dalam artian daerah diberikan wewenang mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2008, tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang menyebutkan bahwa daerah memiliki wewenang membuat kebijakan Daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dibanding Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, maka Undang-Undang nomor 12 tahun 2008, yang aturan pelaksanaannya sudah lebih baik dalam memberdayakan Kecamatan. Namun, masih ada ganjalan terkait kewenangan yang dimiliki. Masalahnya adalah bahwa seluruh urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang perangkat pemerintah daerah, telah terbagi habis kepada dinas, badan, kantor sedangkan, Kecamatan tidak kebagian. Oleh karena itu, kecamatan tidak bisa mengusulkan program kegiatan dalam APBD. Disisi lain, Kecamatan selalu diminta pertanggung jawabannya bila kinerjanya rendah, bila terjadi masalah di desa atau kelurahan, bila pemasukan PBB rendah, dan sebagainya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan, dalam pasal 1 ayat 6 ditegaskan bahwa pembentukan Kecamatan adalah, pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota. Dan pembentukan kecamatan itu sendiri mempunyai beberapa pertimbangan ataupun syarat yang harus dipenuhi seperti syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

Seiring dengan peranan aparatur pemerintah kecamatan, maka pelayanan dapat terlihat dari produktifitas, kreatifitas, efektivitas, dalam rangka pelayanan publik. Adapun menjadi aspek dalam pembangunan kecamatan terdiri dari beberapa bidang yaitu: Bidang pemerintahan, Desa dalam suatu wilayah kecamatan, Ekonomi, Sosial budaya, Pembangunan Masyarakat Desa, 2 keamanan dan ketertiban wilayah. Dalam berbagai bidang pembangunan di atas merupakan satu koordinasi dan tanggung jawab dari kecamatan (R Suawah, 2013).

Pemerintah Kecamatan Ampana Tete merupakan ujung tombak pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang diharapkan dapat merealisasikan pembangunan daerah olehnya dituntut bekerja lebih profesional. Hal ini dapat diperjelas pada Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi tata kerja pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, pasal 5 yang menyebutkan bahwa camat menyelenggarakan tugas umum dan pemerintahan dalam wilayah kecamatan yang meliputi mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Dalam konteks pembangunan Daerah, dalam rangka melayani masyarakat di Kecamatan Ampana Tete dapat ditinjau dari sejauhmana penyelenggaraan pengembangan wilayah yang telah dilaksanakan serta hasil

yang dicapai. Dengan demikian hasil yang dicapai secara nyata dapat dilihat semakin sedikitnya masyarakat miskin mandirinya perekonomian daerah, optimalnya pelayanan masyarakat, yang dikenal dengan indikator pengembangan wilayah.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Ampana Tete pegawai kecamatan diharapkan dapat terlibat dalam memberikan sumbangan yang terbaik dan berprestasi, maka perlu dilakukan beberapa upaya untuk pembenahan. Upaya – upaya yang dilakukan antara lain memberikan motivasi, pendidikan dan pelatihan kepada pegawainya guna meningkatkan pelayanan yang maksimal. Namun yang dialami oleh pegawai kantor kecamatan dalam rangka melayani masyarakat yaitu banyaknya pegawai kecamatan yang tidak bekerja secara optimal disebabkan oleh karena pegawai kecamatan yang belum mematuhi tupoksinya.

Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat pentingnya peran aparatur Pemerintah Kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban umum,

METODE PENELITIAN

Dasar penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian survey, yaitu mengadakan penyelidikan untuk memperoleh fakta- fakta dari gejala- gejala yang ada dan mencari keterangan- keterangan secara faktual. Dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang detail mengenai objek yang diteliti yaitu pelayanan publik oleh aparatur pemerintah di Kecamatan Ampana Tete. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua bagian data primer dan data sekunder. Pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara deskriptif sesuai fenomena- fenomena yang ditemukan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat peranan apatur pemerintah cukup luas dan kompleks dalam masyarakat, maka tugas tugas pemerintah menyangkut soal pengaturan dan pelayanan, karena tanpa adanya bidang pengaturan dan pelayanan maka apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Dalam hal fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah pada prinsipnya memiliki wakil- wakilnya yang dapat didelegasikan sesuai dengan aturan- aturan dan petunjuk yang ada mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah- daerah bahkan sampai di kecamatan mampu menjalankan tugasnya sebagaimana yang diharapkan.

Pemberdayaan Masyarakat

Program pembangunan di wilayah Kecamatan masih menjadi prioritas utama karena Camat memiliki peranan yang sangat strategis terutama dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat (Rachman). Camat bersama- sama dengan aparatur pemerintah Kecamatan Ampana Tete dan masyarakat melaksanakan musyawarah di Kecamatan untuk mengusulkan program pembangunan dalam satu tahun berjalan. Camat dan aparat Kecamatan juga mengawasi dan mengarahkan pekerjaan pembangunan yang masuk di Kecamatan Ampana Tete bersama- sama menjaga dan memelihara pembangunan yang sudah ada. Adapun hasil- hasil pembangunan yang sudahhada antara lain pasar, gedung kantor kecamatan, tugu, dan lain-lain.

Untuk dapat memberdayakan masyarakat diperlukan tokoh- tokoh kunci. Tokoh- tokoh kunci mempunyai kemampuan dalam melakukan pemberdayaan pada masyarakat sebab tokoh- tokoh kunci seringkali diakui sebagai pola panutan, menjadi pendorong dalam membangkitkan semangat dalam melaksanakan berbagai aktivitas dilingkungannya. Tokoh- tokoh kunci yang dimaksudkan antara lain adalah para guru, tokoh- tokoh masyarakat, tokoh- tokoh agama seperti pendeta, imam, serta tokoh- tokoh adat. Pemberdayaan yang dimaksudkan disini bukan hanya membangkitkan semangat masyarakat dalam ikut berpartisipasi tetapi lebih luas lagi dalam pengembangan program pemberdayaan yang lebih menggairahkan sehingga masyarakat berusaha lebih mandiri.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan suatu wilayah. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan Pendidikan.

Di Kecamatan Ampana Tete bentuk pemberdayaan yang dilakukan pemerintah adalah pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program-program, koordinasi dalam pelaksanaan program-program, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan kecamatan. Di bidang ekonomi dilakukan pemberdayaan UKM, industri rumah tangga.

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketertiban di kalangan masyarakat, tentunya harus ada pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan (T Subhayano,2019). Namun demikian ketentraman dan ketertiban umum adalah merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya ditumpukan pada pemerintah daerah atau Kecamatan saja, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga dan memelihara keamanan di wilayah Kecamatan Ampana Tete khususnya.

Diantara beberapa upaya yang selama ini, dilakukan oleh pihak Kecamatan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Ampana Tete, dilakukan melalui beberapa pendekatan – pendekatan, yang terurai sebagai berikut :

a.Pendekatan secara religius (keagamaan)

Melalui tokoh- tokoh agama ini pesan- pesan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum disampaikan, selanjutnya pemuka agama tersebut dalam setiap kesempatan ibadah atau pertemuan-pertemuan keagamaan, dianjurkan untuk menyampaikan pesan- pesan tersebut.

b.Pendekatan Secara Kultural (Budaya)

Perbedaan suku ini sesungguhnya berpotensi untuk dapat dipecah belah oleh oknum yang tidak menginginkan adanya ketentraman dan ketertiban. Hal yang ditempuh oleh Camat Ampana Tete yaitu, melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai suku yang ada. Sebagaimana yang diketahui masyarakat di Kecamatan Ampana Tete, tidak hanya berasal dari suku Bare'e saja tetapi juga suku Bugis, Toraja, Mori yang juga terdapat di Wilayah tersebut. Pendekatan yang dilakukan oleh

Camat dengan tokoh- tokoh dari setiap suku tersebut terus dilakukan secara terus menerus, pendekatan ini bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan melaksanakan kebiasaan hidup dalam suku tersebut.

Sebaik apapun manajemen pelayanan suatu organisasi tentunya tidak lepas dari faktor yang mempengaruhi peran aparatur. . Demikian halnya dengan pelayanan aparatur pemerintah di Kecamatan Ampana Tete. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi peran aparatur Pemerintah Kecamatan yaitu disiplin kerja aparatur, Sebagian besar pegawai masih belum komitmen dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan dan kurang menaati jam kerja. Kemudian hal yang mempengaruhi juga dinamika masyarakat Ampana Tete. Dimana proses perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, yang dihasilkan oleh interaksi sosial antarindividu, kelompok, dan lembaga sosial dalam lingkungan sosial.

PENUTUP

Peranan Pemerintah Kecamatan Ampana Tete, dalam melakukan tugas dan kewajibannya untuk pemberdayaan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban umum sudah berjalan cukup baik. Pemerintah Kecamatan Ampana Tete telah melaksanakan pemberdayaan di bidang pemerintahan desa dan ekonomi. Untuk ketentraman dan ketertiban umum, Pemerintah Kecamatan Ampana Tete melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk melakukan pendekatan secara agama dan budaya sehingga tercipta keamanan dan ketertiban di masyarakat. Namun tentu saja kinerja aparatur Pemerintah Kecamatan ini juga masih belum sepenuhnya optimal dikarenakan disiplin pegawai itu sendiri dan dinamika Masyarakat Kecamatan Ampana Tete yang sangat kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Rachman, Ismail. Peranan Camat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Study Di Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/JAP/article/download/19067/18628>
- R.Suawah, (2013). Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan Tikala Kota Manado
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/download/1586/1276/2952>
- Sugiyono, (2000), Metode Penelitian Sosial, Alfabeta, Bandung.
- T Subhayano. (2019). Peranan Camat dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
<https://repository.uir.ac.id/9936/1/177122071.pdf>
- Undang- undang nomor 12 tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, No. 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan